



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menilai kewajaran atas Anggaran Program/Kegiatan yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

h
a
t
p

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu program.
14. Belanja Tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan peningkatan atau penurunan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "af" or similar.

15. Belanja Variabel adalah biaya yang berubah secara proposional dengan kuantitas volume produksi atau penjualan, jika kuantitas produksi naik atau bertambah maka biaya variable akan ikut bertambah sebesar perubahan kuantitas dikalikan biaya variable per satuan.

BAB II RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN ASB

Pasal 2

ASB dalam Peraturan Bupati ini adalah standar dalam menilai kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD.
- b. Sebagai standar penyusunan plafon anggaran SKPD, fungsi perencanaan pemerintah daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III MUATAN ASB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan; dan
- c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja.

Bagian Kedua Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

- (1) Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang dimaksud dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (3) Contoh penggunaan persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja

Pasal 8

- (1) Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk setiap rincian belanja tiap kegiatan.
- (3) Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja, beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian obyek uraian setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (6) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap rincian obyek, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi dari persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

17
8
21

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 September 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

1. ASB 001
APRESIASI KINERJA PERSONAL/LEMBAGA

a. Deskripsi Kegiatan
Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja perangkat daerah yang lain, ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang.

b. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Penerima Penghargaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 30.164.909 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 2.534.049 per Penerima Penghargaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 30.164.909+ (Rp. 2.534.049x Jumlah Penerima Penghargaan)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	1,0%	1,03%	1,03%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9,2%	0,00%	20,71%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	21,6%	0,00%	58,17%
4	Belanja Honorarium Narasumber	3,3%	0,00%	7,91%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,2%	0,13%	2,35%
6	Belanja Makan dan Minum	3,4%	2,07%	4,66%
7	Belanja Perjalanan Dinas	6,9%	0,00%	14,92%
8	Belanja Sewa	2,1%	0,00%	5,34%
9	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25,3%	0,00%	56,38%
10	Belanja Bahan/Material	18,9%	18,86%	18,86%
11	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,2%	7,19%	7,19%

g
n
p
t

d. Kegiatan ASB 001 :

No	SKPD	Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Apresiasi PTK-PAUDNI berprestasi
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penghargaan Bagi Sekolah Berprestasi
6	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemberian Penghargaan Atlet Pelajar dan Pelatih Berprestasi
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pemberian Penghargaan/reward Pegawai Teladan
8	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN	Penghargaan Penyuluh Berprestasi

2. ASB-002

ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

a. Deskripsi Kegiatan

Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 12.066.813 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.290.383 per Lembaga per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp12.066.813+ (Rp.1.290.383x Jumlah Lembaga x jumlah bulan)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan

Alokasi Obyek Belanja ASB 002 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	3.73%	0.00%	9.99%
2	Belanja Honorarium Non PNS	34.95%	0.00%	91.26%
3	Belanja Honorarium Narasumber	1.70%	0.00%	4.03%
4	Uang Lembur	1.27%	0.29%	2.26%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0.96%	0.00%	3.63%
6	Belanja Jasa	12.79%	0.00%	38.54%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.97%	0.00%	5.34%
8	Belanja Makan dan Minum	2.63%	0.00%	7.29%
9	Belanja Perjalanan Dinas	5.35%	0.00%	12.22%
10	Belanja Bahan/Material	4.36%	0.88%	7.84%

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
11	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.34%	10.06%	14.61%
12	Belanja Sewa	0.44%	0.00%	2.28%
13	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.51%	0.00%	42.03%

d. Kegiatan ASB 002 :

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitas pembentukan PAUD dan TK
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Seni dan Budaya
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Asistensi SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi pendidikan kewirausahaan bagi siswa berprestasi
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
6	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
7	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
8	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
9	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Fasilitasi Pembangunan infrastruktur pedesaan
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. Kubu Raya
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fasilitasi Kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya
17	DINAS PERHUBUNGAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
18	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi pelayanan pindah datang dan penduduk rentan
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi pelayanan pencatatan sipil mobile

2
9
25

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, status anak dan kewarganegaraan
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
23	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi pengembangan kabupaten layak anak
24	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
25	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Penyusunan Perda Anak
26	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
27	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
28	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Melalui Jambore PIK
29	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Kegiatan Satuan Saka Kencana Keluarga Berencana
30	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
31	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
32	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
33	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
34	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
35	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
36	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
37	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi
38	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
39	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

g
f
12

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
40	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
41	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
42	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fasilitasi koordinasi peran dan fungsi FKUB
43	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fasilitasi FPK
44	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fasilitasi bantuan keuangan partai politik dan bantuan sosial kepada ormas dan LSM
45	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fasilitasi Pembinaan Partai Politik
46	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM
47	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
48	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi e-LAKIP
49	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi kegiatan KORPRI kab. kubu raya
50	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
51	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi kegiatan pameran/expo
52	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
53	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah
54	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji
55	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah pada asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia
56	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
57	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi penegasan batas wilayah kecamatan
58	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional
59	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan
60	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Program Reformasi Birokrasi
61	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur
62	SEKRETARIAT DAERAH	Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan
63	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Ibadah Haji
64	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar Keagamaan
65	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi dan Sosialisasi MTQ Tingkat Provinsi

2
g
f
p

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
66	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi
67	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
68	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
69	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
70	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kab. Kubu Raya
71	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kubu Raya
72	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kubu Raya
73	SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
74	INSPEKTORAT DAERAH	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
75	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
76	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Pembinaan Kerohanian PNS Daerah
77	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional
78	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitas Penyelesaian KARIS / KARSU PNS
79	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan kepada PNS yang menerima SLKS
80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Peninjauan Masa Kerja PNS Daerah dan Mutasi lainnya
81	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Asistensi penyusunan RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas SKPD
82	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
84	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
85	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
86	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2
a
f
p

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
87	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
88	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
89	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitasi Pembinaan Monografi
90	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
91	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
92	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
93	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
94	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
95	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
96	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitasi Pembinaan Monografi
97	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
98	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
99	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
100	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
101	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
102	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
103	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitasi Pembinaan Monografi
104	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
105	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
106	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
107	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
108	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
109	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
110	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
111	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitasi Pembinaan Monografi
112	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
113	KANTOR CAMAT TERENTANG	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan

2
a
f
f

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
114	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
115	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
116	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
117	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
118	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
119	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitasi Pembinaan Monografi
120	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
121	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan 37
122	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
123	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
124	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
125	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
126	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
127	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitasi Pembinaan Monografi
128	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
129	KANTOR CAMAT KUBU	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
130	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
131	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
132	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
133	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
134	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
135	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitasi Pembinaan Monografi
136	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
137	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
138	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
139	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
140	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
141	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
142	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
143	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
144	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Pembinaan Monografi
145	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
146	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
147	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
148	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan
149	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitas Dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
150	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan
151	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitasi Pembinaan Posyandu
152	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitasi Pembinaan Monografi
153	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitasi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
154	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Fasilitas Penyelesaian tapal batas Antar Desa dalam Kecamatan
155	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Sistem Informasi POSYANDU
156	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (POSYANTEK)
157	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
158	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi musyawarah pembangunan desa
159	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi pameran TTG
160	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi dan pembinaan pemilihan kepala desa
161	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
162	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
163	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa

11
a
f
p

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan
164	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas
165	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi dan pendampingan inventarisasi aset-aset desa
166	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
167	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
168	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pendampingan International FUnd fro Agricultural Development (IFAD)
170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
171	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Nelayan
173	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
174	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
175	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
176	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pendampingan dan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP

3. ASB-003

BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

a. Deskripsi Kegiatan

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 23.106.587 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.206.991 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

28/12/2023

Rumus Perhitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 23.106.587+ (Rp. 1.206.991x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
 Obyek Belanja ASB 003:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	11.41%	0.00%	25.49%
2	Belanja Honorarium Non PNS	21.60%	0.00%	91.28%
3	Belanja Honorarium Narasumber	4.86%	0.00%	10.44%
4	Uang Lembur	4.67%	0.44%	8.90%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	2.33%	0.00%	5.39%
6	Belanja Jasa Kantor	10.76%	1.36%	20.17%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.43%	0.00%	6.53%
8	Belanja Makan dan Minum	5.71%	0.00%	12.35%
9	Belanja Perjalanan Dinas	12.11%	0.68%	23.54%
10	Belanja Sewa	1.98%	0.00%	10.59%
11	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.73%	1.47%	6.00%
12	Belanja Bahan/Material	5.24%	0.00%	11.07%
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.07%	0.00%	0.57%
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.09%	7.46%	18.73%

- Catatan :
- ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh :belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
 - Jika Pengiriman Peserta keluar daerah dalam rangka mengikuti Pelatihan/Bimbingan teknis dianggarkan dalam belanja Non Urusan (Ex B.A.U)

d. Kegiatan ASB 003 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Bagi Pelaku Seni
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penyusunan Renstra SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Pengumpulan dan Analisis Data SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Manajemen SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penyusunan kurikulum pendidikan menengah
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Praktek pelaksanaan sistem ganda (PSG) SMK
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan pendidikan keaksaraan
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimtek Penyusunan Silabus Pendidikan Non Formal
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kinerja Pendidikan Non Formal
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	POR Paket A, B dan C
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimtek Kewirausahaan SMA/SMK
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Mutu dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan pengawas sekolah
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimtek penyusunan soal ujian akhir sekolah bagi pendidik
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Spiritual Journey For Student tingkat SMA
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan Operasional Sekolah
22	DINAS KESEHATAN	Pendidikan dan pelatihan formal
23	DINAS KESEHATAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
24	DINAS KESEHATAN	Pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA
25	DINAS KESEHATAN	Bimbingan teknis penggunaan obat rasional dengan metode CBIA
26	DINAS KESEHATAN	Reorientasi bidan desa terhadap percepatan desa siaga
27	DINAS KESEHATAN	Bimbingan teknis program penyakit berbasis binatang (P2B2)
28	DINAS KESEHATAN	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
29	DINAS KESEHATAN	Peningkatan mutu manajemen kesehatan
30	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
31	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
32	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

17
a
f
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
34	DINAS PERHUBUNGAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
36	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Bimbingan teknis persampahan
37	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan kader peduli lingkungan hidup (Kalpataru)
38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
39	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
40	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
41	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelatihan kewirausahaan (entrepreneur training)
42	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Bimbingan teknis service provider PKH
43	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Bimtek Reguler Pendamping dan Operator PKH
44	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
45	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Bimtek Pengembangan Kerajinan Daerah
46	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Bimbingan Teknis Kemitraan Koperasi dan UMKM
47	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Bimtek Manajemen Usaha Bagi UMKM Kab Kubu Raya
48	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pelatihan Penataan Organisasi Koperasi
49	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
50	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
51	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
52	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
53	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pelatihan Pemandu Wisata

12
9
7

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
54	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Bimtek Pengembangan Industri Kreatif
55	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
57	SEKRETARIAT DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
58	SEKRETARIAT DAERAH	Bimbingan Teknis Operator Radio Sekabupaten Kubu Raya
59	SEKRETARIAT DAERAH	Bimbingan Teknis Persandian dan Komunikasi
60	SEKRETARIAT DPRD	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
61	INSPEKTORAT DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
62	INSPEKTORAT DAERAH	Pembinaan Pegawai Dilingkungan Inspektorat (In House Training)
63	INSPEKTORAT DAERAH	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
64	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi PNS Daerah
65	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan teknis
66	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan akuntansi satuan kerja perangkat daerah berdasarkan SAP Akrua
68	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bimbingan teknis manajemen pengelolaan aset daerah
70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bimtek tentang tatacara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi pengelolaan keuangan
71	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelatihan Kesamapta
73	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Pembinaan Pemerintahan Desa
74	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
75	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Pembinaan Pemerintahan Desa

11
g
f
p

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
76	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
77	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Pembinaan Pemerintahan Desa
78	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
79	KANTOR CAMAT TERENTANG	Pembinaan Pemerintahan Desa
80	KANTOR CAMAT TERENTANG	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
81	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Pembinaan Pemerintahan Desa
82	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
83	KANTOR CAMAT KUBU	Pembinaan Pemerintahan Desa
84	KANTOR CAMAT KUBU	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
85	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pembinaan Pemerintahan Desa
86	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
87	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Pembinaan Pemerintahan Desa
88	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
89	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pembinaan Pemerintahan Desa
90	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
91	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
92	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Dispenda
93	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
94	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
95	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
96	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
97	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
98	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
99	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Hardwere
100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bimtek pengadaan barang/jasa secara elektronik
101	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

17
9
f
7

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
102	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bagi PNS Daerah
103	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan pengembangan budidaya tanaman gaharu
104	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan Budidaya Lebah Madu
105	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan pelestarian tanaman bakau/mangrove
106	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan Penyuluh Pertanian Swadaya
107	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Kelapa
108	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan Metode Pengolahan Hasil Latek/Karet
109	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Nila
110	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan
111	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pelatihan pembuatan pakan alternatif
112	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pembinaan dan pemberdayaan P2MKP
113	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
114	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan HT
115	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pembinaan teknis, monitoring dan rekonsiliasi PNPB
116	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan
117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
118	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
119	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelatihan Diversifikasi Produk IKM
120	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Bimbingan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan

2
8
f

4. ASB-004
FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

a. Deskripsi Kegiatan

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (*cost driver*):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi serta durasi proses komunikasi atau koordinasi dilakukan. Satu kali koordinasi setara dengan satu minggu, satu bulan koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi.

(1 instansi = 5 orang perwakilan instansi = 5 lembaga di luar instansi/perwakilannya = 1 jaringan di luar instansi pemerintahan. 1 lembaga setara dengan 40 orang peserta bebas tanpa lembaga).

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)
= Rp 15.668.297 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)
= Rp 1.768.465 per Jumlah Lembaga per Durasi dalam Minggu

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 15.668.297 + (Rp 1.768.465 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Minggu)

c. Persentase Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan

Alokasi Obyek Belanja ASB 004 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	3.4%	0.00%	8.09%
2	Belanja Honorarium Non PNS	41.3%	0.00%	92.24%
3	Belanja Honorarium Narasumber	1.5%	0.21%	2.75%
4	Uang Lembur	2.3%	1.13%	3.40%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	1.0%	0.00%	2.22%
6	Belanja Jasa	2.3%	1.67%	2.96%
7	Belanja Pemeliharaan	16.9%	0.00%	37.97%
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.6%	0.07%	1.06%
9	Belanja Makan dan Minum	19.2%	0.00%	95.36%
10	Belanja Perjalanan Dinas	10.8%	0.00%	21.94%
11	Belanja Sewa	0.8%	0.00%	5.42%

Handwritten signature in blue ink.

d. Kegiatan ASB 004 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rapat Koordinasi SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi dana alokasi khusus bidang pendidikan
3	DINAS KESEHATAN	Rapat koordinasi program BPJS
4	DINAS KESEHATAN	Kemitraan bidan dan dukun
5	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Peraturan Daerah RT/RW Kabupaten Kubu Raya
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
14	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi penyusunan AMDAL
15	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi pemecahan masalah dan sengketa lingkungan hidup
16	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dampak kerusakan tanah, air dan udara
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM
18	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
19	SEKRETARIAT DAERAH	Rapat koordinasi evaluasi DEMAPAN, P2KP dan daerah rawan pangan
20	SEKRETARIAT DAERAH	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan Tk. kabupaten dan pusat
21	SEKRETARIAT DAERAH	Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
22	SEKRETARIAT DAERAH	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
23	SEKRETARIAT DAERAH	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
24	SEKRETARIAT DAERAH	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan
25	SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi pembinaan dan pengembangan program PT. UKS di Kab. kubu Raya
26	SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi penegasan batas daerah

8
1
2

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
27	SEKRETARIAT DAERAH	Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan
28	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi Penmyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
29	SEKRETARIAT DPRD	Kegiatan Reses
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Koordinasi Penmyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran
32	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
33	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
34	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
35	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
36	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
37	KANTOR CAMAT TERENTANG	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
38	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
39	KANTOR CAMAT KUBU	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
40	KANTOR CAMAT KUBU	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
41	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
42	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
43	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
44	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
45	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan
46	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan

1
a
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
47	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
48	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Rapat Koordinasi Teknis Pertanian
49	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pertambangan
50	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan

5. ASB-005

KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN

a. Deskripsi Kegiatan

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 368.404 per Jumlah Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Tarif Belanja Variabel x Jumlah Peserta x Jumlah Hari

= Rp. 368.404x Jumlah Peserta x Jumlah Hari

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan

Alokasi Obyek Belanja ASB 005 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	5.0%	2.37%	7.61%
2	Belanja Honorarium Non PNS	42.1%	0.00%	99.02%
3	Belanja Honorarium Narasumber	3.9%	2.35%	5.46%
4	Uang Lembur	9.7%	9.68%	9.68%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	4.0%	1.07%	6.89%
6	Belanja Jasa Kantor	8.6%	8.58%	8.58%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.9%	2.51%	7.19%
8	Belanja Makan dan Minum	8.9%	0.08%	17.71%
9	Belanja Perjalanan Dinas	8.6%	0.00%	19.29%
10	Belanja Bahan/Material	3.0%	3.00%	3.00%
11	Belanja Sewa	1.5%	0.00%	4.50%

Catatan:
ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh: belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

d. Kegiatan ASB 005 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Musyawarah guru mata pelajaran sekolah menengah
2	DINAS KESEHATAN	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pertemuan koordinator KB dan PLKB
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Temu usaha pengusaha dengan UMKM
6	SEKRETARIAT DAERAH	Pengkajian produk-produk hukum
7	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rapat kerja kepala desa sekabupaten kubu raya

6. ASB-006
MONITORING/ PENGAWASAN/ PENGAMATAN

a. Deskripsi Kegiatan
Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah obyek yang diawasi /diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan /pemeriksaan, Jumlah pengamatan

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 18.694.904 Per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 1.940.709 per Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa per titik pengamatan per Jumlah Pemeriksaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 18.694.904 + (Rp. 1.940.709x Jenis Obyek yang dimonitor/ diawasi/ diperiksa x titik pengamatan)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 006 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	3.9%	0.00%	16.93%
2	Belanja Honorarium Non PNS	15.8%	0.00%	76.45%
3	Belanja Honorarium Narasumber	0.9%	0.00%	1.87%

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
4	Uang Lembur	0.8%	0.32%	1.35%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0.5%	0.00%	1.55%
6	Belanja Jasa	1.2%	0.00%	9.11%
7	Belanja Pemeliharaan	0.0%	0.00%	0.10%
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.5%	0.00%	1.36%
9	Belanja Makan dan Minum	0.8%	0.00%	1.84%
10	Belanja Perjalanan Dinas	5.4%	0.00%	15.34%
11	Belanja Sewa	0.2%	0.00%	0.97%
12	Belanja Bahan/Material	2.3%	0.04%	4.66%
13	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	67.6%	41.12%	94.00%

ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh :belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

d. Kegiatan ASB 006 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Scanning Data Hasil Ujian Sekolah
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Base Pendidikan Non Formal Informal
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengawasan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kegiatan penilaian kinerja tenaga pendidik dan evaluasi diri sekolah
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Bantuan Sosial/Hibah Masyarakat
9	DINAS KESEHATAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10	DINAS KESEHATAN	Pengambilan dan pengujian sampel keracunan dan KLB
11	DINAS KESEHATAN	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
12	DINAS KESEHATAN	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
13	DINAS KESEHATAN	Pengumpulan data kesehatan
14	DINAS KESEHATAN	Evaluasi pengelolaan keuangan puskesmas
15	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29/11

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
16	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Survey dan pemetaan
18	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Pengawasan pemanfaatan ruang
20	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kab Kubu Raya
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengumpulan data sosial dan budaya
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian dan evaluasi RKPD
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Ekonomi
27	DINAS PERHUBUNGAN	Pengamanan dan pengawasan angkutan hari raya
28	DINAS PERHUBUNGAN	Strong Point (pengaturan lau lintas di persimpangan)
29	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
30	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor diatas air
31	DINAS PERHUBUNGAN	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
32	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemantauan Kualitas Lingkungan
33	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengkajian dampak lingkungan
34	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup
36	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengembangan data dan informasi lingkungan
37	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan)
38	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomasa
39	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
40	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Sistem Informasi Perencanaan SKPD

12
9
1
2

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Survey indeks kepuasan masyarakat
42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Verifikasi data base kependudukan
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
45	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
46	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
47	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
48	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Monitoring kesempatan kerja (lowongan kerja) dalam dan luar negeri
49	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
50	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan
51	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Verifikasi bantuan sosial/hibah kemasyarakatan
52	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
53	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan
54	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pengembangan, pengendalian, pengawasan koperasi simpan pinjam dan LKM
55	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah
56	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
57	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
58	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
59	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
60	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
61	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan

✓
g
f
#

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
62	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha / Keg. Dibidang Pariwisata
63	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Kreatif
64	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
65	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
66	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pemantauan Orang Asing
67	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan
68	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan
69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan sistem informasi monitoring evaluasi kinerja pembangunan (SIMEKBANG)
70	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
71	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pendataan Lokasi Pasca Bencana
73	SEKRETARIAT DAERAH	monitoring dan Evaluasi Radio SSB dan 2 Meter Band
74	SEKRETARIAT DAERAH	Sistem Informasi Tanah Aset Pemerintah
75	SEKRETARIAT DAERAH	Pembinaan dan pengawasan raskin (beras miskin) kab, kubu raya
76	SEKRETARIAT DAERAH	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah
77	SEKRETARIAT DAERAH	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
78	SEKRETARIAT DAERAH	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan kabupaten Kubu raya
79	SEKRETARIAT DAERAH	Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik
80	SEKRETARIAT DAERAH	Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik
81	SEKRETARIAT DAERAH	Penyebarluasan Informasi
82	SEKRETARIAT DAERAH	Penerbitan Buletin
83	SEKRETARIAT DAERAH	Penguatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
84	SEKRETARIAT DAERAH	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
85	SEKRETARIAT DAERAH	Pengelolaan dan penataan dokumentasi dokumentasi hukum

2
8
1
2

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
86	SEKRETARIAT DAERAH	Pembuatan dan penyusunan softcopy/file produk hukum daerah
87	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi rancangan peraturan daerah dan klarifikasi peraturan daerah
88	SEKRETARIAT DAERAH	Evaluasi Rancangan peraturan desa
89	SEKRETARIAT DAERAH	Penataan dan monitoring administrasi kecamatan
90	SEKRETARIAT DAERAH	Penataan, Monitoring dan Evaluasi SOPD Kab. Kubu Raya
91	SEKRETARIAT DAERAH	Penilaian Kinerja Kecamatan
92	SEKRETARIAT DAERAH	Monitoring dan Koordinasi Pengelolaan Usaha Daerah
93	SEKRETARIAT DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
94	SEKRETARIAT DPRD	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kab. Kubu Raya
95	SEKRETARIAT DPRD	Penerbitan buletin parlementaria dan profil DPRD
96	SEKRETARIAT DPRD	Penanganan Pengaduan Masyarakat
97	INSPEKTORAT DAERAH	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Bagi Pengawas Inspektorat
98	INSPEKTORAT DAERAH	Koordinasi Penmyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
99	INSPEKTORAT DAERAH	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan SKPD
100	INSPEKTORAT DAERAH	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
101	INSPEKTORAT DAERAH	Inverisasi temuan pengawasan
102	INSPEKTORAT DAERAH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
103	INSPEKTORAT DAERAH	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
104	INSPEKTORAT DAERAH	Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah desa
105	INSPEKTORAT DAERAH	Pemutakhiran data hasil pengawasan
106	INSPEKTORAT DAERAH	Review laporan keuangan pemerinta kabupaten kubu raya
107	INSPEKTORAT DAERAH	Kegiatan review laporan LAKIP pemerintah kabupaten kubu raya
108	INSPEKTORAT DAERAH	Kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
109	INSPEKTORAT DAERAH	Review Terhadap Kebijakan Akuntansi AkruaI dan Aplikasi Sistem Pendukung Implementasi Akuntansi AkruaI
110	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Sistem Penataan Administrasi Kepegawaian

12
g
f
p

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
111	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penataan arsip/dokumen pengelolaan keuangan
112	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Inventarisasi barang daerah
113	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penilaian barang inventaris milik pmda kabupaten kubu raya
114	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penghapusan barang inventaris milik pemerintah daerah kabupaten kubu raya
115	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Evaluasi pengelolaan keuangan daerah
116	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengamanan Barang milik daerah
117	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
118	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengendalian keamanan lingkungan
119	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah
120	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Operasi pengaturan dan penjagaan, pengawalan dan patrol
121	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengendalian kebijakan dan gangguan dari kalangan masyarakat
122	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penertiban Razia Warnet
123	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penertiban Razia Layang-layang
124	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng)
125	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penertiban Razia Anak Sekolah
126	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penertiban Razia Rumah Kos
127	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
128	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Penataan Kearsipan
129	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
130	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
131	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penataan Kearsipan
132	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
133	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
134	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penataan Kearsipan
135	KANTOR CAMAT TERENTANG	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
136	KANTOR CAMAT TERENTANG	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
137	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penataan Kearsipan
138	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD

2
8
1
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
139	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
140	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penataan Kearsipan
141	KANTOR CAMAT KUBU	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
142	KANTOR CAMAT KUBU	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
143	KANTOR CAMAT KUBU	Penataan Kearsipan
144	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
145	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
146	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penataan Kearsipan
147	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
148	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
149	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penataan Kearsipan
150	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
151	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
152	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
153	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penataan Kearsipan
154	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penertiban reklame
155	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pengawasan Insidentil Pajak Daerah
156	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan ADD
157	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
158	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
159	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pemetaan dan pemanfaatan tata batas desa
160	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
161	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
162	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Rangka Kontribusi Menara Telekomunikasi

12
8
4
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
163	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk pestisida
164	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
165	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan
166	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Validasi, Update Data Peternakan dan Informasi Harga
167	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Produk Hasil Peternakan
168	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian/Perikanan/Kehutanan
169	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Evaluasi Jabatan SKPD
170	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Supervisi/penilaian kinerja penyuluh
171	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
172	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan
173	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Inventarisasi Pemukiman Infrastruktur, dan Lahan Garapan Masyarakat di Dalam Lawasan Hutan
174	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan
175	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Monitoring realisasi produksi HA dan HT
176	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan
177	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
178	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
179	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Monitoring dan pemeliharaan ketenagaan lisrik
180	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyusunan Database Air Tanah
181	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya
182	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos
183	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan

9
4
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
184	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
185	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pengawasan dan monitoring kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan
186	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
187	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
188	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Verifikasi bantuan sosial/hibah kemasyarakatan
189	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
190	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Revisi Masterplan dan DED PPI Sungai Kakap
191	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pengelolaan wilayah konservasi laut daerah
192	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
193	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pendataan Pedagang dan Potensi Pasar Tradisional
194	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Monitoring dan Evaluasi Industri
195	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya
196	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelaksanaan Sensus dan Penyusunan Database Metrologi

7. ASB-007
MENGIKUTI PAMERAN

- a. Deskripsi Kegiatan
- Mengikuti Pameran adalah kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
- Pengendali belanja (*cost driver*):
- Durasi Hari Kegiatan dan Pameran,
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
- = Rp. 21.155.172 per hari kegiatan dan pameran
- Rumus Penghitungan Belanja Total:
- = Rp 21.155.172x Jumlah Hari kegiatan dan Pameran
- c. Batasan ALokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
- Alokasi Obyek Belanja ASB 007 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	1.32%	1.32%	1.32%
2	Belanja Honorarium Non PNS	12.33%	0.00%	27.14%
3	Belanja Honorarium Narasumber	6.87%	0.00%	14.94%

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
4	Uang Lembur	1.85%	0.00%	3.94%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	4.50%	0.31%	8.68%
6	Belanja Jasa Kantor	2.33%	2.33%	2.33%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.23%	0.63%	3.84%
8	Belanja Makan dan Minum	7.63%	0.00%	21.93%
9	Belanja Perjalanan Dinas	25.75%	8.13%	43.38%
10	Belanja Sewa	6.40%	0.54%	12.26%
11	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.76%	6.00%	23.51%
12	Belanja Bahan/Material	13.76%	0.00%	30.48%
13	Belanja Pakaian	0.27%	0.00%	1.11%

d. Kegiatan ASB 007 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Festival Budaya Bumi Khatulistiwa
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pagelaran Budaya Daerah
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kubu Raya Fair
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Workshop Mata Pelajaran UN
5	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyelenggaraan pameran investasi
6	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Gebyar Kemilau Kubu Raya
7	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pemuda Kapal Nasional (PKN)
8	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pelaksanaan Pagelaran dan Promosi Pariwisata Tingkat Nasional
9	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar
10	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
11	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Produk Peternakan
12	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Gelar Teknologi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
13	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Promosi Hasil Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
14	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pameran Expo Perikanan
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Provinsi dan Kabupaten

8. ASB-008
PEMBENTUKAN BADAN ATAU ORGANISASI

- a. Deskripsi Kegiatan
Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara legal (hukum) maupun formal.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Badan atau Unit Organisasi
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 4.894.371 per Jumlah Organisasi
- Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Rp. 4.894.371 x Jumlah Organisasi
- c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 008 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	16.7%	16.75%	16.75%
2	Belanja Honorarium Non PNS	32.8%	32.80%	32.80%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3.9%	2.31%	5.48%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.5%	0.77%	2.24%
5	Belanja Makan dan Minum	8.5%	6.57%	10.35%
6	Belanja Perjalanan Dinas	27.6%	23.78%	31.43%
7	Belanja Honorarium Narasumber	2.4%	0.76%	3.95%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.6%	6.63%	6.63%

- d. Kegiatan ASB 008 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan Desa
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kubu Raya

9. ASB-009
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

- a. Deskripsi Kegiatan
Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu

posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan
Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 14.888.633,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 613.438,- per orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 14.888.633 + (Rp 613.438x Peserta x Hari Pelatihan)

- c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 009 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	5.6%	0.73%	10.42%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5.7%	0.00%	13.34%
3	Belanja Honorarium Narasumber	11.2%	3.47%	18.86%
4	Uang Lembur	2.3%	2.33%	2.33%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	1.7%	0.48%	2.96%
6	Belanja Jasa Kantor	32.1%	2.87%	61.23%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.9%	0.00%	15.33%
8	Belanja Makan dan Minum	11.0%	0.00%	22.42%
9	Belanja Perjalanan Dinas	6.8%	1.53%	12.11%
10	Belanja Sewa	3.8%	0.00%	12.77%
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.9%	0.00%	2.82%
12	Belanja Pakaian	2.1%	0.00%	7.82%
13	Belanja Bahan/Material	2.3%	0.76%	3.82%
14	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.4%	1.09%	11.61%
15	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	2.3%	2.31%	2.31%

~
g
f
7

- d. Kegiatan ASB 009 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Menulis Buku Non Fiksi Bagi Guru SD, SMP, SMA/SMK
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operator Dapodik
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Guru Kesenian
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Silabus Taman Pendidikan Al-Quran
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
8	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelatihan / Diklat Kepemimpinan bagi Anak
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pelatihan manajemen Keuangan Koperasi
10	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
11	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pelaksanaan Diklat Wasit/Juri Cabor
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan Perjenjangan Struktural
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Diklat PPNS

0. ASB-010

PENDIRIAN PRASARANA JALAN, IRIGASI, JARINGAN DAN JEMBATAN.

a. Deskripsi Kegiatan

Pendirian prasarana jalan, irigasi, jaringan dan jembatan merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana jalan, irigasi, jaringan dan jembatan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Sarana

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 17.842.084 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= 1.005per Nilai Sarana

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 17.842.084+ (1.005x Nilai Sarana)

= Rp. 17.842.084+ (1.005x Nilai Sarana) + Nilai Sarana

Nilai keseluruhan tersebut selain Nilai Sarana harus didistribusikan dalam alokasi

belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan

Alokasi Obyek Belanja ASB 010 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	0.0%	0.00%	0.03%
2	Belanja Honorarium Non PNS	1.5%	0.00%	3.01%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.1%	0.00%	0.29%
4	Belanja Pemeliharaan	8.6%	0.00%	43.98%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.0%	0.00%	0.08%
6	Belanja Perjalanan Dinas	1.7%	0.34%	3.07%

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
7	Belanja Modal	83.6%	68.23%	99.01%
8	Belanja Jasa Konsultansi	4.5%	2.51%	6.42%

d. Kegiatan ASB 010 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	Pembangunan jalan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
2	Pembangunan jembatan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
3	Pembangunan turap/talud/bronjong	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
4	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
6	Pembangunan pintu air	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
7	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
8	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
9	Pembangunan jaringan rawa	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
10	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan rawa	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
11	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
12	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
13	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
14	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
15	Pembangunan prasarana pengendalian banjir	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
16	Pemeliharaan Saluran Pusat-pusat Pengendali Banjir	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
17	Pembangunan jembatan	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
18	Pembangunan jalan lingkungan	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
19	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
20	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
21	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
22	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
23	Pemeliharaan/Peningkatan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN
24	Pembangunan dermaga/steigher	DINAS PERHUBUNGAN
25	Pemasangan Konstruksi Jaringan Air Bersih/PDAM	BADAN LINGKUNGAN HIDUP

g f

11. ASB-011
PERENCANAAN PRASARANA BANGUNAN

a. Deskripsi Kegiatan
Perencanaan prasarana bangunan merupakan kegiatan untuk merencanakan dalam rangka menghasilkan dokumen yang memuat perencanaan terhadap prasarana bangunan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum. ASB ini dimulai dari persiapan, survey hingga menyusun dokumen rencana.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Jasa Konsultan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp.2.341.330per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= 1,003x Nilai Jasa Konsultan

Rumus Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 2.341.330 + (1,003x Nilai Jasa Konsultan) + Jasa Konsultan

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 011
Nilai keseluruhan tersebut selain jasa konsultan harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	0.0%	0.04%	0.04%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0.3%	0.15%	0.39%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.2%	0.00%	0.42%
4	Belanja Jasa Konsultansi	99.5%	99.16%	99.87%

d. Kegiatan ASB 011 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan pembangunan jalan
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan pembangunan jembatan
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan turap/talud/bronjong
5	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
6	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Sumber Daya Air
7	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan/pengawasan rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
8	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Pengendalian Banjir

12. ASB-012
PENGADAAN SARANA FISIK NON KONSTRUKSI
(BELANJA MODAL)

a. Deskripsi Kegiatan
Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama satuan kerja perangkat daerah ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan sarana dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan sarana merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Sarana Fisik

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 4.718.563 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= (1,00x Nilai Sarana Fisiknya)

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 4.718.563 + (1,00x Nilai Sarana Fisiknya) + Nilai Sarana Fisiknya.

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 012 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	0.0%	0.00%	0.00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0.0%	0.00%	0.00%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.0%	0.00%	0.00%
4	Belanja Modal	100.0%	100.00%	100.00%

ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

d. Kegiatan ASB 012 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan mebeleur
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan mesin/kartu absensi
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan buku-buku perpustakaan
7	DINAS KESEHATAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
8	DINAS KESEHATAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
9	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
10	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
11	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
12	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Pengadaan mebeleur
13	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
14	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
15	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
16	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyediaan penampungan air hujan (PAH)
17	DINAS PERHUBUNGAN	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
18	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
19	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
20	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan mebeleur
21	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
22	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan pagar pengaman jalan
23	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan rambu-rambu sungai
24	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Lampu Peringatan
25	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
27	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
28	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan peralatan gedung kantor
29	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemasangan Instalasi Listrik
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan mobil jabatan
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan peralatan gedung kantor
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan mebeleur
34	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
35	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2
a
t
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
36	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan peralatan gedung kantor
37	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan mebeleur
38	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
39	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
40	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
41	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
42	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Pengadaan mebeleur
43	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
44	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Pengadaan peralatan gedung kantor
45	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Pengadaan mebeleur
46	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
47	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
48	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengadaan peralatan gedung kantor
49	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengadaan mebeleur
50	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
51	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
52	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadaan peralatan gedung kantor
53	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadaan mebeleur
54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
57	SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
58	SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan mebeleur
59	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan peralatan gedung kantor
60	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan mebeleur
61	INSPEKTORAT DAERAH	pengadaan Kendaraan dinas/operasional

nd
at
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
62	INSPEKTORAT DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
63	INSPEKTORAT DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
64	INSPEKTORAT DAERAH	Pengadaan mebeleur
65	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
66	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan mebeleur
67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
68	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan mebeleur
70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
71	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan peralatan gedung kantor
72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan mebeleur
73	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
74	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Pengadaan peralatan gedung kantor
75	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Pengadaan peralatan gedung kantor
76	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Pengadaan peralatan gedung kantor
77	KANTOR CAMAT TERENTANG	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
78	KANTOR CAMAT TERENTANG	Pengadaan peralatan gedung kantor
79	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Pengadaan peralatan gedung kantor
80	KANTOR CAMAT KUBU	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
81	KANTOR CAMAT KUBU	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
82	KANTOR CAMAT KUBU	Pengadaan peralatan gedung kantor
83	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
84	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pengadaan peralatan gedung kantor
85	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
86	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Pengadaan peralatan gedung kantor
87	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
88	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
89	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pengadaan peralatan gedung kantor
90	DINAS PENDAPATAN DAERAH	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
91	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2
a
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
92	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
93	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pengadaan mebeleur
94	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
95	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
96	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pengadaan peralatan gedung kantor
97	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pengadaan mebeleur
98	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
99	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
101	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
102	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan peralatan gedung kantor
103	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan mebeleur
104	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
105	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengadaan mebeleur
106	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
107	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
108	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
109	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pengadaan mebeleur
110	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
111	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
112	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
113	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Pengadaan mebeleur
114	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
115	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
116	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pengadaan mebeleur
117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

2
g
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
118	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
119	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
120	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
121	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Kendaraan Operasional Metrologi
122	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Peralatan Standar dan Perlengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

13. ASB-013
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI

a. Deskripsi Kegiatan
Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya peraturan daerah/peraturanBupati final.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Perda/Perbup yang dibuat

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 87.024.116 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 76.192.125 per Jumlah perda/perbup yang dibuat

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 87.024.116+ (Rp. 76.192.125x Jumlah perda/perbup yang dibuat)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 013 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	1.4%	0.00%	3.27%
2	Belanja Honorarium Non PNS	18.4%	0.00%	38.04%
3	Belanja Honorarium Narasumber	3.7%	0.55%	6.81%
4	Uang Lembur	6.4%	2.70%	10.05%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	1.9%	0.13%	3.70%
6	Belanja Jasa Kantor	7.3%	7.26%	7.26%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.9%	2.17%	11.53%
8	Belanja Makan dan Minum	2.4%	0.00%	4.96%
9	Belanja Perjalanan Dinas	48.6%	0.00%	95,47%
10	Belanja Sewa	0.1%	0.00%	0.33%
11	Belanja Modal	3.0%	2.99%	2.99%

d. Kegiatan ASB 013 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung
3	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan KUA dan PPAS
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan rancangan RKPD
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
7	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah
8	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
15	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K)

14. ASB-014
PENYUSUNAN STANDAR

- a. Deskripsi Kegiatan
Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketentuan standar tersebut.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 8.441.743 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 1.883.953per Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan x Jumlah Buku.

Rumus Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 8.441.743+ (Rp 1.883.953x Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan)
Nilai keseluruhan tersebut selain Nilai Sarana harus didistribusikan dalam alokasi
belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 014 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	14.4%	4.90%	23.81%
2	Belanja Honorarium Non PNS	27.2%	0.00%	59.15%
3	Belanja Honorarium Narasumber	5.0%	0.00%	10.14%
4	Uang Lembur	7.3%	3.16%	11.46%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	2.3%	0.40%	4.18%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.3%	0.00%	6.25%
7	Belanja Makan dan Minum	3.4%	0.00%	7.97%
8	Belanja Perjalanan Dinas	16.9%	2.35%	31.40%
9	Belanja Sewa	0.5%	0.00%	2.27%
10	Belanja Jasa Konsultansi	20.8%	20.75%	20.75%

d. Kegiatan ASB 014 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan akreditasi SMP
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan standar operasional pendidikan
4	DINAS KESEHATAN	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
5	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
6	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya
10	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
12	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan standar operasional (SOP)
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)
16	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
17	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyusunan standar operasional produk (SOP)
18	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembahasan dan penyusunan upah minimum
19	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
20	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan SOP Pelayanan Terhadap Koperasi dan UMKM
22	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
23	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 ; 2008
24	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyusunan SOP SKPD
25	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
26	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
28	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan standar satuan harga
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan dan Pemusnahan Barang Inventaris Milik Pemda Kab. Kubu Raya
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan standarisasi biaya pemeliharaan barang daerah
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
35	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
36	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
37	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

7
a
t

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
38	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
39	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
40	KANTOR CAMAT KUBU	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
41	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
42	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
43	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
44	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
45	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan standar operasional Prosedur
46	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyusunan Standar Operasional (SOP)
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
48	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
49	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
50	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
51	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
52	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

art

15. ASB-015
SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK

- a. Deskripsi Kegiatan
Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Peserta Sosialisasi
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 31.551.399per Kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 983.413per Jumlah Peserta Sosialisasi
- Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 31.551.399+ (Rp. 983.413x Jumlah Peserta Sosialisasi)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 015:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium	4.3%	0.00%	22.55%
2	Uang Lembur	1.2%	0.23%	2.27%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.7%	0.00%	1.87%
4	Belanja Jasa Kantor	1.3%	0.79%	1.76%
5	Belanja Pemeliharaan	77.7%	56.27%	99.20%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.7%	0.00%	1.87%
7	Belanja Makan dan Minum	1.7%	0.00%	4.28%
8	Belanja Perjalanan Dinas	3.4%	0.00%	8.06%
9	Belanja Sewa	0.4%	0.00%	1.46%
10	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.2%	1.25%	5.18%
11	Belanja Modal	1.0%	0.00%	5.54%
12	Belanja Bahan / Material	3.3%	0.00%	7.26%
13	Belanja Pakaian	0.0%	0.00%	0.29%
14	Belanja Jasa Konsultansi	1.0%	0.97%	0.97%

d. Kegiatan ASB 015 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi Undang-Undang Tentang Cagar Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kegiatan Sosialisasi SPM Guru SD, MI, SMP dan MTs Tahun 2015
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kegiatan Sosialisasi SPM Kepala Sekolah SD, MI, SMP dan MTs Tahun 2015
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kegiatan Sosialisasi SPM Pengawasan SD, MI, SMP dan MTs Tahun 2015
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi Peningkatan Penerapan SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lokakarya/Workshop dan Analisis PKP-SPM Pendidikan Dasar Tahun 2015
12	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pengawasan sarana distribusi obat dan persediaan kesehatan
13	DINAS KESEHATAN	Peningkatan PIO kepada masyarakat oleh tenaga farmasi

g
f
t

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
14	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
15	DINAS KESEHATAN	Peningkatan kesehatan masyarakat
16	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
17	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
18	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
19	DINAS KESEHATAN	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
20	DINAS KESEHATAN	Pembinaan UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat)
21	DINAS KESEHATAN	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
22	DINAS KESEHATAN	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
23	DINAS KESEHATAN	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
24	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
25	DINAS KESEHATAN	Sanitasi berbasis masyarakat
26	DINAS KESEHATAN	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
27	DINAS KESEHATAN	Peningkatan imunisasi
28	DINAS KESEHATAN	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
29	DINAS KESEHATAN	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
30	DINAS KESEHATAN	Penanggulangan penyakit tidak menular
31	DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Pengobatan Pencegahan Massal/POPM FILARIA
32	DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Pengobatan Pencegahan Massal/POPM FILARIA
33	DINAS KESEHATAN	Sosialisasi program SJSN
34	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan kesehatan anak balita
35	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Pemberdayaan petani pemakai air
36	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
37	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
38	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Persampahan di Kecamatan
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019
40	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Sosialisasi insentif pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup

7
g
f
p

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
41	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan masyarakat peduli api
42	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Green And Clean School (Adiwiyata)
43	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
44	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sosialisasi kebijakan kependudukan
47	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
48	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (penerapan e-KTP)
49	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KIE
50	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembinaan Keluarga Berencana
51	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
52	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembelajaran/pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan
53	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
54	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
55	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KB medis operasi
56	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
57	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembinaan perlindungan anak
58	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

81

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
59	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembinaan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan pemanfaatan lahan lingkungan
60	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
61	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
62	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Sosialisasi dan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
63	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sosialisasi pelatihan dan produktivitas kerja
64	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
65	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI didalam dan luar negeri
66	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan transmigrasi lokal
67	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan
68	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
69	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Workshop Penyusunan Proposal Pinjaman Koperasi dan UMKM
70	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kios PKL/UMKM
71	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Workshop penyusunan laporan keuangan simpan pinjam koperasi
72	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Workshop kerjasama antar lembaga untuk pembiayaan koperasi dan UMKM
73	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Sosialisasi peraturan perundang-undang koperasi
74	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Perdagangan dan Reklame
75	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
76	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengembangan Media Promosi Pariwisata
77	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

7
8
9
10

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
78	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Workshop Animasi
79	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sosialisasi Peraturan Kepariwisataaan
80	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sosialisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
81	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyuluhan kepada masyarakat
82	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembinaan Ketertiban Masyarakat
83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
84	SEKRETARIAT DAERAH	Sosialisasi, promosi dan kampanye P2KP
85	SEKRETARIAT DAERAH	Sosialisasi dan promosi pangan segar
86	SEKRETARIAT DAERAH	Sosialisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
87	SEKRETARIAT DAERAH	Sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
88	SEKRETARIAT DAERAH	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
89	SEKRETARIAT DAERAH	Penyuluhan hukum
90	SEKRETARIAT DAERAH	RANHAM
91	SEKRETARIAT DAERAH	Penyebarluasan produk hukum
92	SEKRETARIAT DAERAH	Keluarga sadar hukum
93	SEKRETARIAT DAERAH	Sistem Informasi Hukum
94	SEKRETARIAT DAERAH	Safari Keagamaan
95	INSPEKTORAT DAERAH	Sosialisasi LHKPN
96	INSPEKTORAT DAERAH	Workshop Rencana Aksi Daerah SPIP
97	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Sosialisasi Undang-undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
98	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Sosialisasi PP 53 Tahun 2010
99	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyuluhan/Sosialisasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
101	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Sosialisasi Penanganan Perlindungan Masyarakat
102	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
103	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
104	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
105	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
106	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

2
a
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
107	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
108	KANTOR CAMAT TERENTANG	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
109	KANTOR CAMAT TERENTANG	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
110	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
111	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
112	KANTOR CAMAT KUBU	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
113	KANTOR CAMAT KUBU	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
114	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
115	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
116	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
117	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
118	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
119	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Pembinaan Ketentraman Ketertiban
120	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penyampaian SPPT PBB
121	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Sosialisasi PBB dan BPHTB
122	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Sosialisasi Pajak Daerah
123	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Pemberdayaan Lembaga Adat Istiadat Desa
124	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
125	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemberdayaan Masyarakat Informasi
126	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan dan Sosialisasi Email Server @kuburayakab.go.id di pemkab kubu raya
127	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pemberdayaan Sumber Daya Lokal
128	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembinaan, Perataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak
129	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Produksi Peternakan
130	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
131	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyuluhan dan Pendampingan Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam "Wana Lestari" Tingkat Kecamatan
132	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pengembangan dan Pelatihan Keterampilan Penyuluh Swadaya Masyarakat (PKSM)
133	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyuluhan dan Pengembangan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)
134	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyusunan program penyuluh perkebunan
135	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyuluhan pemanfaatan lahan tanaman perkebunan tanpa bakar

ad
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
136	BADAN PEL AKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Pemberdayaan dan Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Kelompok
137	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Sosialisasi, pembinaan dan pengendalian pembangunan hutan kemasyarakatan kabupaten kubu raya
138	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Kegiatan preventif (sosialisasi, intelijen, pulbaket)
139	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat
140	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
141	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
142	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan Konsumen

16. ASB-016
PERINGATAN HARI BESAR AGAMA DAN NASIONAL

- a. Deskripsi Kegiatan

Analisa Standar Belanja Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional adalah standar belanja yang digunakan untuk melaksanakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peringatan hari besar

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 12.218.465 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 33.386.751per Jumlah peringatan hari besar

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 12.218.465+ (Rp. 33.386.751x Jumlah peringatan hari besar)
- c. Batasan ALokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan

Alokasi Obyek Belanja ASB 016 :
- | NO | OBJEK BELANJA | RATA-RATA | BATAS BAWAH | BATAS ATAS |
|----|-------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 4.3% | 2.32% | 6.36% |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 2.2% | 0.08% | 4.24% |
| 3 | Belanja Honorarium Narasumber | 2.3% | 0.15% | 4.39% |
| 4 | Uang Lembur | 0.7% | 0.75% | 0.75% |
| 5 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.8% | 0.00% | 25.12% |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.5% | 0.00% | 3.06% |
| 7 | Belanja Makan dan Minum | 23.1% | 0.00% | 61.08% |
| 8 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.4% | 0.00% | 19.06% |
| 9 | Belanja Sewa | 38.6% | 0.00% | 93.31% |
| 10 | Belanja Bahan/Material | 5.0% | 5.02% | 5.02% |

11	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.1%	5.08%	5.08%
----	--	------	-------	-------

d. Kegiatan ASB 016 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hari anak nasional
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hari Keaksaraan Nasional
3	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan peringatan hari anak
4	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan peringatan hari ibu
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Peringatan HUT Koperasi Tingkat Kabupaten/Nasional
6	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) DANA PERGESERAN DARI KEGIATAN PELAKSANAAN TC CABOR PORKAB
7	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan Peringatan HKP, HPS, dan PKK Tk. Provinsi
8	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Hari Krida Pertanian Tk Prov Kalbar

17. ASB-017
KEGIATAN PERLOMBAAN

- a. Deskripsi Kegiatan
Kegiatan ini merupakan perlombaan untuk aparaturnya dan non-aparaturnya yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah lomba dan jumlah peserta
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 15.016.816 per Kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 3.590.730 per peserta
- Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 15.016.816+ (Rp. 3.590.730 x Jumlah Peserta)

2
g
f

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 017:

NO	OBJEK BELANJA	RATA- RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	7.5%	0.00%	19.56%
2	Belanja Honorarium Non PNS	7.8%	2.34%	13.26%
3	Belanja Honorarium Narasumber	4.3%	0.00%	9.29%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	16.0%	0.00%	38.29%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.2%	0.39%	4.03%
6	Belanja Makan dan Minum	9.5%	0.00%	19.27%
7	Belanja Perjalanan Dinas	7.5%	2.19%	12.73%
8	Belanja Sewa	4.3%	0.00%	13.70%
9	Belanja Pakaian	6.1%	2.17%	10.12%
10	Belanja Bahan / Material	3.9%	2.15%	5.74%
11	Belanja Modal	16.4%	16.45%	16.45%
12	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	14.4%	7.12%	21.60%

d. Kegiatan ASB 017 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	POR PAUD 36
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan olimpiade matematika dan IPA
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lomba sekolah sehat SMP/MTs
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan olimpiade sains nasional SMP
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lomba Parade Cinta Tanah Air
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lomba keterampilan siswa
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lomba debat bahasa inggris dan mandarin siswa
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pekan olahraga nasional (POR guru nasional)
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru)
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan PORSENI Mahasiswa Kubu Raya Tahun 2015
15	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Festival Seni dan Musik Tradisional
16	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Bupati Cup
17	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Festival Olahraga Tradisional

at

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
18	SEKRETARIAT DAERAH	Lomba cipta karya menu 3B berbasis potensi sumber daya lokal
19	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten
20	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan perlombaan desa

18. ASB-018
BANTUAN PENDIDIKAN

- a. Deskripsi Kegiatan
Bantuan pendidikan kepada pegawai dan siswa berprestasi
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah siswa yang menerima bantuan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 5.083.126 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 10.140.639 per siswa

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 5.083.126+ (Rp. 10.140.639x jumlah siswa)

- c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 018 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	0.5%	0.47%	0.47%
2	Belanja Honorarium Non PNS	83.7%	83.72%	83.72%
3	Belanja Honorarium Narasumber	0.2%	0.12%	0.34%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0.4%	0.24%	0.48%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.4%	0.08%	0.64%
6	Belanja Makan dan Minum	1.0%	0.54%	1.45%
7	Belanja Perjalanan Dinas	9.2%	0.00%	20.21%
8	Belanja Sewa	4.7%	0.99%	8.33%

- d. Kegiatan ASB 018 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Beasiswa Pendidikan Dokter
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Seleksi Mahasiswa Pendidikan Kedokteran
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Beasiswa Siswa Berprestasi dalam Bidang Akademik dan Non Akademik
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

19. ASB-019
PENANGANAN MASALAH KESEHATAN

a. Deskripsi Kegiatan

Penanganan masalah kesehatan adalah kegiatan untuk menangani berbagaimasalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuan kerja perangkat daerah tersebut dan menangani masalah ringan yang bisa di atasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah objek yang ditangani

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 25.257.644per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 2.729.316per Jumlah objek yang ditangani

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 25.257.644+ (Rp. 2.729.316 x Jumlah objek yang ditangani)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 019 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	1.0%	0.00%	2.11%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0.2%	0.04%	0.39%
3	Belanja Honorarium Narasumber	0.0%	0.01%	0.08%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0.1%	0.00%	0.25%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.1%	0.01%	0.18%
6	Belanja Makan dan Minum	0.1%	0.03%	0.11%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0.1%	0.03%	0.26%
8	Belanja Bahan/ Material	0.3%	0.07%	0.50%
9	Belanja Sewa	0.1%	0.00%	0.20%
10	Belanja Premi Asuransi	3.2%	0.00%	7.55%
11	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	94.6%	94.57%	94.57%
12	Belanja Pakaian	0.1%	0.07%	0.19%
13	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0.1%	0.07%	0.07%

data

d. Kegiatan ASB 019 :

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS KESEHATAN	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2	DINAS KESEHATAN	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
3	DINAS KESEHATAN	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
4	DINAS KESEHATAN	Jaminan kesehatan penduduk miskin
5	DINAS KESEHATAN	Jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
6	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
7	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Rujukan
8	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Persalinan
9	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Rawat Inap
10	DINAS KESEHATAN	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
11	DINAS KESEHATAN	Pelayanan kesehatan
12	DINAS KESEHATAN	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
13	DINAS KESEHATAN	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
14	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelayanan kesehatan panti asuhan/panti jompo

20. ASB-020
PENANGANAN KASUS

- a. Deskripsi Kegiatan

Penanganan kasus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan/menyelesaikan kasus – kasus hukum/pengaduan yang terjadi.
- b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah kasus yang ditangani

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 32.811.375 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 10.570.125 per Jumlah kasus yang ditangani

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 32.811.375+ (Rp. 10.570.125x Jumlah kasus yang ditangani)
- c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan

Alokasi Obyek Belanja ASB 020 :
- | NO | OBJEK BELANJA | RATA-RATA | BATAS BAWAH | BATAS ATAS |
|----|-------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 10.3% | 5.94% | 14.61% |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 1.0% | 0.99% | 0.99% |
| 3 | Belanja Honorarium Narasumber | 21.1% | 5.29% | 36.89% |
| 4 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.4% | 1.66% | 3.09% |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 3.4% | 3.39% | 3.39% |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.4% | 0.00% | 10.27% |
| 7 | Belanja Makan dan Minum | 7.0% | 2.85% | 11.05% |
| 8 | Belanja Perjalanan Dinas | 39.5% | 19.88% | 59.04% |
| 9 | Belanja Sewa | 2.6% | 0.00% | 5.76% |
| 10 | Belanja Bahan/Material | 4.1% | 4.14% | 4.14% |
| 11 | Belanja Pakaian | 4.2% | 4.24% | 4.24% |

d. Kegiatan ASB 020:

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS KESEHATAN	Surveilans / pelacakan kasus kematian bayi
2	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelesaian perkara perdata dan TUN
3	SEKRETARIAT DAERAH	Lokakarya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kab. Kubu Raya
4	INSPEKTORAT DAERAH	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
5	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyidikan kasus-kasus tindak pidana kehutanan

21. ASB-021
PENYUSUNAN LAPORAN

a. Deskripsi Kegiatan

Analisa Standar Biaya Penyusunan Laporan dihitung berdasarkan tingkat kesulitan penyusunan laporan dan durasi/jangka waktu pengerjaan laporan berdasarkan jumlah bulan yang dibutuhkan untuk penyelesaian laporan, untuk tingkat kesulitan mengacu pada table dibawah ini :

No	Tingkat Kesulitan	Nilai Tingkat Kesulitan
1	Mudah	1
2	Sedang	2
3	Sulit	3

b. Pedoman Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Pengendali belanja (*cost driver*):
Tingkat Kesulitan dan Durasi Laporan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 5.308.588 per Tingkat Kesulitan dan per Durasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Rp. 5.308.588 x Nilai Tingkat Kesulitan x Durasi (Bulan)

c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja Kegiatan
Alokasi Obyek Belanja ASB 021 :

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	10,4%	0,28%	20,45%
2	Belanja Honorarium Non PNS	38,7%	0,00%	92,82%
3	Belanja Honorarium Narasumber	10,3%	2,63%	18,06%
4	Uang Lembur	9,1%	3,80%	14,47%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	3,0%	0,83%	5,11%
6	Belanja Jasa	1,0%	0,00%	15,83%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,8%	0,00%	7,14%
8	Belanja Makan dan Minum	4,3%	0,76%	7,79%
9	Belanja Perjalanan Dinas	20,4%	6,47%	34,27%
10	Belanja Sewa	0,0%	0,00%	0,29%

d. Kegiatan ASB 021:

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5	DINAS KESEHATAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6	DINAS KESEHATAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
7	DINAS KESEHATAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8	DINAS KESEHATAN	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
9	DINAS KESEHATAN	Penyusunan LPPD
10	DINAS KESEHATAN	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
11	DINAS KESEHATAN	Penyusunan dokumen perencanaan program SPM dan MDGs
12	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
13	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
15	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
16	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
17	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
18	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
20	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
21	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Penyusunan rencana kerja SKPD
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2015 dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
28	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan analisis jabatan SKPD
29	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
31	DINAS PERHUBUNGAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
32	DINAS PERHUBUNGAN	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)
33	Badan Lingkungan Hidup	Penyusunan analisis jabatan SKPD
34	Badan Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
35	Badan Lingkungan Hidup	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
36	Badan Lingkungan Hidup	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
37	Badan Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan analisis jabatan SKPD
39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
40	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan LPPD SKPD
43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan profil perkembangan kependudukan
44	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan analisis jabatan SKPD
45	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
46	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2
9
1
7

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
47	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
48	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
49	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan database dan profil bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB
50	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyusunan analisis jabatan SKPD
51	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
52	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
53	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
54	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
55	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
56	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
57	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
58	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan LPPD
59	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Penyusunan Profil Produk UMKM di Kabupaten Kubu Raya
60	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
61	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
62	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
63	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
64	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
65	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
66	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
67	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

17
9
f
4

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
68	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
69	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
70	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyusunan LPPD SKPD
71	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
72	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
73	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
74	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
75	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan LPPD SKPD
76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
77	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
79	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
80	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
81	SEKRETARIAT DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
82	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah SKPD
83	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD
84	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
85	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan database kelompok wanita tani (KWT) melalui OPP dengan konsep KRPL
86	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan database kelompok afinitas desa pangan (DEMAPAN) kab. kubu raya
87	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten
88	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten
89	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan Database E-Formasi
90	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan analisis Jabatan SKPD
91	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2
1
1
2

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
92	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
93	SEKRETARIAT DPRD	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
94	INSPEKTORAT DAERAH	Penyusunan analisis Jabatan SKPD
95	INSPEKTORAT DAERAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
96	INSPEKTORAT DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
97	INSPEKTORAT DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
98	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
99	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
101	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
102	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
103	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
104	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
105	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
106	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
107	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
108	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
109	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
111	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
112	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan LKPJ dan LPPD Satpol PP
113	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan SPM Satpol PP
114	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan BAP
115	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

R
g
t
f

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
116	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
117	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
118	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
119	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	Penyusunan Profil Kecamatan
120	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penyusunan analisis Jabatan SKPD
121	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
122	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
123	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
124	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penyusunan Profil Kecamatan
125	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
126	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan analisis Jabatan SKPD
127	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
128	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
129	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
130	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
131	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan Profil Kecamatan
132	KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
133	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
134	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
135	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
136	KANTOR CAMAT TERENTANG	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
137	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
138	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan Profil Kecamatan
139	KANTOR CAMAT TERENTANG	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
140	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

7
8
9
10

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
141	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
142	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
143	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
144	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
145	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan Profil Kecamatan
146	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
147	KANTOR CAMAT KUBU	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
148	KANTOR CAMAT KUBU	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
149	KANTOR CAMAT KUBU	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
150	KANTOR CAMAT KUBU	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
151	KANTOR CAMAT KUBU	Penyusunan Profil Kecamatan
152	KANTOR CAMAT KUBU	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
153	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penyusunan analisis Jabatan SKPD
154	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
155	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
156	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
157	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penyusunan Profil Kecamatan
158	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
159	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penyusunan analisis Jabatan SKPD
160	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
161	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
162	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
163	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penyusunan Profil Kecamatan
164	KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
165	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
166	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
167	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
168	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
169	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
170	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan Profil Kecamatan
171	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
172	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD
173	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
174	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan rencana strategi SKPD
175	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD
176	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
177	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
178	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
179	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah (LPPD)
180	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan profil desa
181	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyusunan analisis jabatan SKPD
182	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
183	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
184	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
185	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD
186	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
187	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
188	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
189	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan LPPD SKPD
190	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan SPM
191	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD

12
9
1
7

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
192	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
193	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
194	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
195	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan LPPD SKPD
196	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
197	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
198	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
199	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD
200	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyusunan Evaluasi jabatan SKPD
201	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
202	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
203	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
204	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN	penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan
205	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penyusunan Evaluasi jabatan SKPD
206	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
207	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
208	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
209	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penyusunan LPPD SKPD
210	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
211	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
212	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
213	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

213

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
214	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Laporan keuangan PertanggungJawaban
215	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Data Base Industri

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 September 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 . NOMOR 29